

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 53/PUU-XV/2017 BERDASARKAN UNDANG
– UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI



Oleh

Beni Bereando Girsang

150710014

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TAHUN 2019

SURAT PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beni Bereando Girsang

Npm : 150710014

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“ ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU – XV/2017 BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM “

Adalah hasil karya sendiri bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis kutipan dalam naskah ini dan disebut sumber kutupan dari daftar pustaka.

Apabila dalam skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur – unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dapat dibatalkan, serta diproses secara Peraturan Perundang – Undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 11 Februari 2018

Yang menyatakan

Beni Bereando Girsang

150710014

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 53/PUU-XV/2017 BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

Beni Bereando Girsang

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 12 Februari 2019

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Pembimbing

ABSTRAK

Hak untuk dipilih ataupun memilih adalah hak konstitusional warga negara. Namun bagaimana jika syarat - syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak tepat relevansinya pembentukannya dengan Undang - Undang Dasar 1945. Kemudian Partai Idaman melayangkan gugatan Uji Materi terhadap Pasal tersebut. Kemudian diputus gugatan tersebut dengan NOMOR 53/PUU – XV/2017. Tujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum apakah sudah sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, untuk mengetahui bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Ketentuan hukum yang bertentangan dengan konstitusi wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi memberikan wewenangnya yaitu pengujian serta membatalkan jika memang bertentangan dengan konstitusi. Hasil penelitian ini bahwa pasal 222 tentang *presiden treshold* telah bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan dalam memutus putusan uji materi Mahkamah Konstitusi harus melakukan penafsiran yang sesuai hukum acaranya. Pembahasan penelitian ini ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berdasarkan pasal 222 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu gugatan uji materi pemohon sudah sesuai dengan Undang – Undang dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi sudah melakukan penafsiran yang sesuai tertulis di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 memberikan akibat mempersempit peluang warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Presiden Treshold

ABSTRACT

The right to be elected or elected is the constitutional right of citizens. But what if the conditions for nominating the president and vice president as regulated in Law Number 7 of 2017 do not have the right relevance of their formation with the 1945 Constitution. Then the Ideal Party casts a lawsuit on the Material Test against the Article. Then the lawsuit was decided by NUMBER 53 / PUU - XV / 2017. This study aims to: a. To review and analyze whether the Constitutional Court ruling Number 53/PUU-XV/2017 is based on Law Number 7 of 2017 concerning whether the general election is in accordance with the Procedural Law of the Constitutional Court. To find out how the implications of the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XV/2017. The study of the normative aspects that can be seen The Constitutional Court is a judicial institution established to uphold law and justice. The legal provisions that are contrary to the constitution are compulsory. The Constitutional Court gives its authority namely testing and canceling if it is contrary to the constitution. The results of this study On the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XV/2017 Based on Law Number 7 of 2017, the Constitutional Court decided an applicant's judicial claim is in accordance with the 1945 Basic Law and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The Constitutional Court has made written interpretations in the Constitutional Court Procedure Law in deciding a case. With the Decision of the Constitutional Court Number 53/PUU-XV/2017 gives the effect of narrowing the chances of citizens who wish to run for President and / or vice president.

Keywords : Constitutional Court, General Election, Presiden Treshold

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (SI) pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis bersemangat skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu, kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis berusaha membuat skrip ini takkan terwujud, bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr.Nur Elfi Husda, S.Kom.M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H.M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah menyediakan banyak masukan dan arahan juga dapat membantu membayar untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Jhonsyah Girsang dan Berliana Rahmayanti selaku orang tua penulis.
6. Virginia Teresia Valentina Girsang dan Axel Satria Anggara Girsang selaku adik – adik penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
LAMPIRAN 1 BIOGRAFI	
LAMPIRAN 2 SURAT IZIN PENELITIAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Batasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penulisan.....	12
1.6. Manfaat Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori.....	14
2.1.1. Teori Hukum Progresif	14
2.1.2. Teori Universalis Hak Asasi Manusia	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	17
2.2.1 Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	17
2.2.2. Asas – Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	23
2.2.3. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Perundang – Undangan	29

2.3.	Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum	36
2.3.1.	Pengertian Pemilu	36
2.3.2.	Fungsi dan Tujuan Pemilu	37
2.3.3.	Asas – Asas dalam Pemilihan Umum	38
2.4.	Kerangka Yuridis	40
2.4.1.	Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang – Undangan	40
2.4.2.	Landasan Yuridis Mengenai Mahkamah Konstitusi	41
2.4.3.	Landasan Yuridis Mengenai Pemilihan Umum	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Jenis Penelitian	43
3.2.	Metode Pengumpulan Data	44
3.2.1.	Jenis Data	44
3.2.2.	Alat Pengumpulan Data	46
3.2.3.	Metodologi Analisis Data	46
3.2.4.	Penelitian Terdahulu	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Hasil Penelitian	52
4.1.1.	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	52
4.1.2.	Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar 1945	55
4.2.	Pembahasan	59
4.2.1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017	59
4.2.2.	Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU -XV/2017 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017	70
BAB V PENUTUP		
5.1.	Simpulan	73
5.2.	Saran	74
DAFTAR PUSAKA		75
LAMPIRAN		